

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era Globalisasi ini, persaingan suatu negara pada sektor ekonomi semakin lama semakin meningkat. Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan suatu negara. Berkembangnya suatu negara dapat dilihat dengan kualitas kesejahteraan penduduknya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kesejahteraan penduduk pada suatu negara yaitu: tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan tingkat pembangunan pada negara tersebut.

Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Koperasi merupakan sarana peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional bagi masyarakat, bukan untuk mengejar keuntungan semata. Sekalipun keuntungan bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota, akan tetapi usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus tetap memperoleh penghasilan yang layak demi menjaga kelangsungan hidup para anggota dan meningkatkan kemampuan usaha bukan untuk memupuk kekayaan, sehingga pada setiap akhir periode koperasi dapat ditargetkan untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila koperasi menduduki hal yang penting dalam sebuah perkembangan suatu negara disamping faktor-faktor lainnya.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat 1, koperasi adalah ” badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Oleh karena itu, koperasi harus menjadi lembaga ekonomi rakyat yang berkembang agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Secara umum,

koperasi dikenal sebagai suatu bentuk perusahaan yang dikelola bersama-sama untuk mensejahterakan anggotanya. Dilihat dari asal katanya, istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *co-operation* yang artinya usaha bersama, yaitu suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula.

Segala aktivitas kinerja yang dilakukan oleh koperasi sudah seharusnya dikelola secara profesional dan didukung oleh semua anggota koperasi dengan cara melakukan evaluasi setiap tahunnya yang ditandai dengan diadakannya rapat anggota. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 26, “rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau”. Dengan adanya evaluasi tersebut, koperasi dapat terus mengembangkan usahanya sehingga mampu berkiprah dengan baik dalam rangka memperoleh keuntungan optimal demi memajukan kesejahteraan anggota. Keberhasilan koperasi dalam memajukan kesejahteraan anggotanya dapat dilihat dari berbagai faktor, salah satu faktor yang paling utama adalah faktor *financial* (keuangan). Faktor keuangan tersebut sangat penting untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan usaha pada koperasi, karena hal itu maka kinerja keuangan harus dievaluasi. Selain faktor keuangan, tingkat kesehatan pada koperasi juga dapat memperlihatkan kinerja koperasi tersebut dari predikat sangat tidak sehat sampai dengan predikat sehat. Pengevaluasian tingkat kesehatan koperasi dapat diukur dari berbagai rasio keuangan yang dianalisis atas dasar laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan data yang paling penting didalam suatu badan usaha termasuk juga koperasi, yang mana laporan keuangan ini berguna untuk membantu koperasi dalam memperoleh informasi mengenai hasil yang dicapai oleh koperasi.

Perwujudan dari kesungguhan pemerintah dalam mengelola dana pada koperasi adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya karena kesehatan kinerja merupakan bagian dalam suatu lembaga usaha. Dengan mengetahui tingkat kesehatan usaha, para anggota dapat dengan mudah menilai kinerja lembaga tersebut. Oleh karena itu, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang “Perubahan atas Peraturan Menteri Negara bahwa: Koperasi dan UKM No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan. Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KSP dan USP Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan.

Koperasi Wanita Keluarga Pusri (KWKP) Palembang adalah koperasi milik organisasi Dharma Wanita PT Pusri yang didirikan pada tanggal 17 November 1981 oleh ibu Endang Wardijoso yang pada saat itu sedang menjabat sebagai ketua sub unit pada organisasi Dharma Wanita PT Pusri dengan badan hukum No: 002227/BH/XX/21.Nop.1981. Saat ini KWKP beralamat di Jl. Kacapiring No.11 Komplek PT Pusri, Palembang. KWKP memiliki berbagai unit usaha diantaranya: konfeksi, konsumsi, umum, kerajinan, jasaboga, cafeteria, dan juga simpan-pinjam. Setiap Badan Usaha pasti ingin mengetahui perkembangan dan pertumbuhan usahanya, begitupun juga KWKP, apabila KWKP ingin terus berkembang maka KWKP harus melaksanakan aktivitasnya dengan baik agar tujuan utama berdirinya KWKP dapat tercapai sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan.

Koperasi Wanita Keluarga Pusri (KWKP) Palembang perlu melakukan evaluasi terhadap tingkat kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009. Evaluasi tingkat kesehatan koperasi pada KWKP menunjukkan total seluruh rasio pada tahun 2012 adalah 72, tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 69 dan pada tahun 2014 adalah 71, sehingga menurut kriteria penilaian tingkat kesehatan koperasi yang diatur pada Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 termasuk kategori cukup sehat karena total seluruh rasio pada tahun 2012, 2013 dan 2014 dibawah nilai 80. Hal ini dikarenakan masih jauhnya nilai standar yang ditetapkan

oleh peraturan tersebut terhadap total hasil akhir dari aspek likuiditas dan aspek efisiensi. Hal mencerminkan kurangnya kinerja yang ada pada KWKP dan perlu diperbaiki untuk dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, Koperasi Wanita Keluarga Pusri (KWKP) Palembang perlu melakukan analisis tingkat kesehatan pada koperasi, agar dapat mengelola dana dengan baik serta dapat menjaga kesehatan kinerjanya karena kesehatan kinerja merupakan bagian dalam suatu lembaga usaha.

Penilaian Tingkat Kesehatan pada Koperasi Wanita Keluarga Pusri (KWKP) Palembang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009. Pada peraturan tersebut, terdapat aspek-aspek penilaian yang terdiri dari beberapa rasio keuangan. dan penilaian manajemen. Rasio keuangan menurut peraturan tersebut yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada KWKP yaitu: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas serta aspek kemandirian dan pertumbuhan. Dengan melakukan penilaian tingkat kesehatan ini, diharapkan dapat membantu koperasi dalam mengetahui kelemahan dan juga kekurangan yang ada pada koperasi saat ini sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana dimasa yang akan datang agar dapat lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat laporan akhir dengan masalah tersebut yang berjudul **“Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Wanita Keluarga Pusri (KWKP) Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada poin 1.1 dan data laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada Koperasi Wanita Keluarga Pusri (KWKP) Palembang, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana kondisi tingkat kesehatan Koperasi Wanita Keluarga Pusri (KWKP) Palembang bila dilihat dari aspek efisiensi dan aspek likuiditas.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan masalah agar tidak terjadi penyimpangan dan lebih terarah solusinya serta dapat mencapai tujuan penulisan laporan akhir ini. Untuk itu penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada analisis aspek penilaian kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII tahun 2009 yang meliputi: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas serta aspek kemandirian dan pertumbuhan dengan beberapa komponen rasio keuangan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada diatas, laporan akhir ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta mengevaluasi seberapa besar kondisi tingkat kesehatan koperasi bila dilihat dari dua aspek, yaitu: aspek efisiensi dan aspek likuiditas pada Koperasi Wanita Keluarga Pusri (KWKP) Palembang.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan laporan akhir ini adalah :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam menyusun laporan akhir serta dapat menambah ilmu pengetahuan akuntansi khususnya pada mata kuliah analisa laporan keuangan.

2. Bagi Perusahaan

Memberi masukan dan saran bagi Koperasi Wanita Keluarga Pusri (KWKP) Palembang agar dapat memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan KWKP dalam mengevaluasi tingkat kesehatan pada koperasi di masa yang akan datang.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan referensi yang bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya dan sebagai acuan penulisan selanjutnya agar dapat dikembangkan.

1.5 Metode Pengumpulan dan Sumber Data

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan akhir ini dibutuhkan data yang akurat, objektif dan dapat mendukung sebagai bahan analisis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada diperusahaan. Dalam kegiatan pengumpulan data guna menganalisis permasalahan yang ada pada Koperasi Wanita Keluarga Pusri (KWKP) Palembang penulis menggunakan beberapa cara.

Menurut Sanusi (2013:105) pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Cara survei

Cara survei merupakan cara pengumpulan data di mana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis. Jika pernyataan diajukan dalam bentuk lisan maka namanya wawancara, kalau diajukan secara tertulis disebut kuisisioner. Berkaitan dengan itu, cara survei terbagi menjadi dua bagian, yaitu wawancara (interview) dan kuisisioner.

a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon.

b. Kuisisioner, pengumpulan data sering tidak memerlukan kehadiran peneliti, namun cukup diwakili oleh daftar pertanyaan (kuisisioner) yang sudah disusun secara cermat terlebih dahulu.

2. Cara Observasi

Cara observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku maupun nonperilaku.

3. Cara Dokumentasi Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti : laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturanperaturan, data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat perusahaan, dan sebagainya, biasanya telah tersedia di lokasi. Penyusun tinggal menyalin sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan Sanusi (2013), teknik yang digunakan oleh penulis dalam penulisan laporan akhir ini adalah dengan cara survei dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objeknya yaitu, Koperasi Wanita Keluarga Pusri (KWKP) Palembang. Selain itu, penulis menggunakan cara dokumentasi dengan mengumpulkan data-data perusahaan berupa laporan laba rugi dan neraca.

1.5.2 Sumber Data

Dalam penyusunan laporan akhir ini penulis membutuhkan data yang mendukung dalam penyelesaian rumusan masalah yang terjadi pada perusahaan. Sumber data berdasarkan cara memperolehnya, menurut Sanusi (2013:104) dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu :

1. Data Primer
Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Terkait dengan data sekunder, peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.

Berdasarkan sumber sumber data yang di atas, maka penulis menggunakan sumber data primer. Berikut ini data primer yang diperoleh penulis dari Koperasi Wanita Keluarga Pusri (KWKP) Palembang:

1. Sejarah singkat perusahaan.
2. Struktur organisasi perusahaan.
3. Pembagian tugas dan wewenang.
4. Laporan Laba Rugi.
5. Neraca.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besarnya laporan akhir ini terdiri dari lima bab yang isinya mencerminkan susunan materi yang akan dibahas. Tiap bab memiliki hubungan langsung antara satu dengan yang lainnya. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika pelaporan akhir secara garis besar yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan dan sumber data serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas. Teori tersebut antara lain: pengertian koperasi, laporan keuangan dan analisa laporan keuangan, metode dan teknik analisis laporan keuangan, pengertian analisis ratio keuangan, pengertian kesehatan koperasi dan indikator pengukuran tingkat kesehatan koperasi menurut Peraturan Menteri Negara dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII tahun 2009.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum yang berhubungan dengan perusahaan, aktivitas perusahaan, struktur organisasi dan pembagian tugas, laporan keuangan koperasi berupa neraca dan laporan laba rugi yang dibandingkan antara tahun 2012, 2013 dan 2014.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menganalisis laporan keuangan pada Koperasi Wanita Keluarga Pusri (KWKP) Palembang dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII tahun 2009 yang meliputi: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas serta aspek kemandirian dan pertumbuhan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini penulis akan mengemukakan kesimpulan sebagai hasil dari analisis yang ada pada bab IV serta memberikan saran-saran yang mungkin dapat membantu Koperasi Wanita Keluarga Pusri (KWKP) Palembang di masa yang akan datang dalam menjalankan aktivitas usahanya.